BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Ketentuan tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika sebagai sarana kegiatan pengobatan maupun pemulihan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan harapan agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dalam mendapatkan pemulihan haknya diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 2. Pertimbangan hakim atas pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika apabila terdakwa terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan pertimbangan karena keyakinan terhadap terdakwa belum mencapai tahap kecanduan narkotika, baru pada tahap penyalahgunaan narkotika serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika oleh karena itu terhadap terdakwa perlu diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan barang bukti yang didapatkan berupa Kristal sebesar 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram), berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika, terdakwa dapat hukuman berupa rehabilitasi

B. Saran

- Diharapkan agar pemerintah melalui instansi BNN dan instansi terkait dapat melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna dengan kesadaran sendiri untuk menyerahkan diri kepada instansi BNN untuk secara suka rela melakukan rehabilitasi
- Diharapkan agar majelis hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang baru pertama kali mengkonsumsi narkoba